

REKRUTMENT POLITIK DALAM PENETAPAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Dikota Pontianak)

Oleh:
SITI ROMLAH
NIM. E02112069

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016

Email: Ella.mh@yahoo.com

Abstrak

Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa indikator rekrutmen politik dan mekanisme dalam penyaringan calon legislatif di DPD PKS dikota Pontianak Tahun 2014 Berdasarkan masalah yang terjadi dalam penelitian ini yaitu mengenai mindset masyarakat yang masih menganggap bahwa PKS adalah partai yang bersifat tertutup namun menurut pernyataan dari ketua DPD PKS kota Pontianak bahwa PKS adalah partai yang bersifat terbuka Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pola rekrutmen pada partai PKS dikota Pontianak. Adapun indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mencakup tiga indikator pertama penyaringan, pencalonan dan pemilihan calon legislatif Dalam penyaringan pada PKS terdapat dua mekanisme yaitu internal dan eksternal partai adapun dari internal partai yaitu melalui kader inti dan struktur kepengurusan sedangkan eksternal yaitu melalui para tokoh yang dianggap layak jual dimasyarakat adapun dari proses pencalonan partai tidak membuka pendaftaran secara terbuka pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 karena PKS lebih mengedepankan internal partai jadi para kader hanya mengusulkan nama nama yang akan di calonkan kemudian disaring melalui tim yang terdiri dari ketua DPD, Sekretaris dan bendahara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, maka hasil penelitian ini ditemukan bahwa bahwa PKS adalah partai yang bersifat cenderung tertutup dimana dari proses penyaringan, pencalonan serta pemilihan calon legislatif partai tidak membuka kesempatan dari kalangan eksternal pada pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Kata-kata Kunci : Rekrutment, PKS, DPD

Abstract

This thesis aims to analyze indicators of political recruitment and mechanisms for screening candidates in DPD PKS city of Pontianak 2014. Based on the problems that occurred in this study is the mindset of people who still think that MCC is a party that are closed but according to a statement from the chairman of DPD PKS of Pontianak city that MCC is a party that is open. So the researchers are interested in examining how the recruitment pattern of the PKS party in the city of Pontianak. The first indicators used in this study are includes three screening, nomination and election of candidates. In filtering the MCC, there are two mechanisms: internal and external parties as for the internal party that is through a cadre of core and management structure while the external is through the figures considered marketable in the community while on the nomination process of the party was not open for registration openly in legislative elections in 2014 because PKS emphasizes the internal party cadres so just propose names to be nominated and then filtered through a team consisting of the DPD chairman, Secretary and treasure. Including study conducted by researchers, the results of this study found that the MCC is a party that is tends closed where from the screening process, the nomination and election of candidates the party did not open the chance of external parties in legislative elections in 2014.

Keyword :Recruitment, PKS, DPD

A. PENDAHULUAN

A. 1. Latar Belakang Masalah

Pada era demokrasi saat ini terdapat Partai politik yang hadir ditengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu sebagai wadah atau hasil Perubahan UUD 1945 tahun 1999-2002 mengamanatkan, setiap rekrutmen yang dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan politik dalam Pemerintahan (*eksekutif*), Perwakilan (*legislatif*), dan Peradilan (*yudikatif*) baik di tingkat Pusat maupun Daerah mekanismenya harus melalui partai politik

Ketentuan diatas menunjukkan bahwa fungsi dan keberadaan partai politik menjadi sangat penting dalam relasi pengisian pos-pos kenegaraan melalui mekanisme politik yang demokratis. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam partai politik agar mendapatkan eksistensi dalam sistem politik. Rekrutmen politik atau representasi politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara. karena proses ini menentukan orang-orang

yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik Negara melalui lembaga-lembaga yang ada oleh karena itu, tercapai tidaknya suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas rekrutmen politik.

Keberadaan suatu partai politik dapat dilihat dari kemampuan partai politik tersebut melaksanakan Fungsinya. Adapun Fungsi rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi atau rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur rekrutmen yang berbeda. Partai politik yang ada seharusnya dapat melakukan mekanisme rekrutmen politik yang dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas di masyarakat. Salah satu tugas pokok dalam rekrutmen politik adalah bagaimana partai politik yang ada dapat menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk duduk di lembaga legislatif (DPR/DPRD).

Selain itu juga Partai Keadilan Sejahtera memiliki peranan penting dengan keberdayaan dan kinerja dipemerintahan Indonesia itu sendiri. Karena keberadaan Partai Keadilan Sejahtera ini menentukan bagaimana dan kearah mana pelaksanaan pemerintah berjalan kedepannya. Dapat

kita ketahui bahwa salah satu arus utama rekrutmen adalah kaderisasi dan seleksi pemimpin dalam sistem kenegaraan yang demokratis melalui partai politik. Saat ini ada beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh partai politik adalah bagaimana mulai menata diri agar proses seleksi kader/pemimpin mampu melahirkan pemimpin yang berkualitas.

Partai Keadilan Sejahtera dikenal dengan partai dakwah berawal dengan sebutan PK (Partai Keadilan). Lahirnya PK pada saat pasca lengsernya presiden Soeharto pada 21 Mei 1998, Partai Keadilan berdiri pada tanggal 20 Juli 1998 dalam sebuah konferensi Pers di aula masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru Jakarta yang diketuai oleh Nur Mahmudi Ismail. Pemilu pertama di era Reformasi yang diadakan pada tanggal 7 Juni 1999 PK terbukti gagal dalam memperoleh suara (*electoral threshold*) salah satu syarat untuk mengikuti pemilu selanjutnya. Ketertutupan PK menjadi salah satu penyebab anjloknya suara di pemilu. Yang mana hanya meraih 1,36 persen dari total pemilih 1,4 juta pemilih. Gagal dalam mencapai *electoral threshold* PK bersalin nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera pada April 2002. Selanjutnya, pada tanggal 2 Juli 2003 PK menyelesaikan seluruh prosesnya sehari

kemudian, PK bergabung dengan PKS penggabungan ini sekaligus menandai hak milik PK menjadi PKS dengan penggabungan ini Partai Keadilan (PK) resmi berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Model Rekrutmen pada partai Keadilan Sejahtera ialah menggunakan mekanisme penjangkauan dengan mengusulkan nama-nama kader dari tingkat bawah yaitu DPRA (Dewan Pimpinan Ranting) di tingkat kelurahan dan DPC (Dewan Perwakilan Cabang) ditingkat Cabang di DPD (Dewan Perwakilan Daerah) kemudian diseleksi dan dimusyawarahkan melalui tim seleksi dan melakukan proses yang ditetapkan oleh partai. Dalam pemilu Legislatif tahun 2014 merupakan ajang dalam perekrutan yang diusung oleh partai politik untuk bisa duduk di kursi parlemen sehingga partai politik melakukan Rekrutmen terhadap para calon anggota yang menurutnya sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dan syarat partai yang diusung dalam memperoleh pemimpin yang berkualitas untuk bisa duduk di kursi parlemen. Pada partai PKS tentunya dalam merekrut caleg yang akan diusulkan partai mempunyai syarat yang harus dipenuhi untuk bakal

caleg yang akan ditetapkan oleh partai yaitu:

1. kriteria bakal calon harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. pria dan wanita yang berketuhanan yang maha esa serta beraqidah dan berakhlak baik
3. berkomitmen terhadap visi dan misi partai
4. tidak sedang terkait kasus hukum
5. tidak mempunyai rekam jejak dan citra yang buruk
6. tidak sedang terkena sanksi partai tingkat menengah dan berat
7. memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang (tidak cacat fisik dan mental yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan dan tidak menderita sakit yang kronis).
8. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu, khususnya yang diperlukan dilembaga legislatif
9. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi diantaranya minat dengan kegiatan-kegiatan publik, melakukan lobi-lobi, berinteraksi dengan media, mampu mempengaruhi orang lain, berani mengambil resiko, mampu berkomunikasi dan berargumentasi menjalin net working dan siap meningkatkan kemampuan diri
10. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis didakwah, masyarakat, kampus atau organisasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
11. Mempunyai pemahaman tentang peranan politik dalam dakwah, dan tujuan dalam menegakkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai islam.
12. Pengurus inti partai dan anggota dewan ditingkat pusat/provinsi/kabupaten/ kota sebagai berikut tidak dapat menjadi Bakal Calon Anggota Dewan. Namun dapat dipertimbangkan oleh musyawarah partai untuk mengikuti survey kepatutan dan kelayakan Calon anggota Dewan
13. Bakal Calon Anggota Dewan DPRD Provinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya berpendidikan SMA atau sederajat.
14. Dikenal cukup berpengaruh dimasyarakat atau dikenal sebagai tokoh masyarakat
15. Potensi yang dimiliki dapat memperlancar kemenangan dipemilu
16. Dapat berasal dari anggota inti, anggota pendukung, atau simpatisan partai

17. Bersedia untuk melakukan akad dakwah dan politik dengan partai.

Aktifitas para kader pada saat ini terus berkembang dalam memaksimalkan kesempatan untuk mencari dukungan dari masyarakat dalam mempersiapkan pemilu tahun 2014 di kota Pontianak. Partai Keadilan Sejahtera tidak membuka pendaftaran namun dalam mempersiapkan calon yang akan diusung partai melakukan usulan nama-nama bakal caleg yang akan bersaing pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 yaitu berjumlah sebanyak 59 orang dan yang diterima melalui mekanisme penjaringan partai kemudian ditetapkan sebagai calon legislatif sebanyak 45 orang.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pamungkas (2011:90) dalam Setiawan (2015:3) bahwa rekrutmen politik menjadi penentu wajah partai di ruang publik. Siapa mereka, dari mana asalnya, apa ideologinya, bagaimana pengalaman politiknya, dan bagaimana kapasitas politiknya akan menjadi petunjuk awal wajah partai politik di ruang publik. Dan wajah partai di ruang publik sangat tergantung pada bagaimana rekrutmen politik dilakukan oleh partai politik.

Pengrekrutan calon legislatif pada partai Keadilan Sejahtera memiliki beberapa

kriteria yaitu, *Pertama*, Dalam Pengrekrutan caleg Partai Keadilan Sejahtera dilakukan secara terbuka. *Kedua*, Partai Keadilan Sejahtera tidak membedakan latar belakang agama, suku, dan Ras caleg. *Ketiga*, Partai Keadilan Sejahtera tidak memandang sudut pandang dari taraf pendapatan. Keempat Cara perekrutan Caleg dalam partai Keadilan Sejahtera yang terpenting Mempunyai pemikiran intelektual yang baik Namun, dalam hal ini, pengrekrutan pada partai Keadilan Sejahtera Tahun 2014 memiliki beberapa kendala yaitu, tentang mindset masyarakat yang masih menganggap Partai Keadilan Sejahtera cenderung tertutup. Namun, kenyataannya pada 10 tahun yang lalu PKS sendiri telah mengumumkan secara nasional bahwa PKS adalah partai terbuka. Terdapat alasan tentang pemilihan Partai Keadilan Sejahtera yang menjadi agenda penelitian.

Pertama PKS merupakan Partai Islam dengan partai yang solid sehingga partai PKS disebut dengan partai dakwah karena PKS mengedepankan pada kebaikan namun, dalam pengrekrutan pada PKS tidak melihat latar belakang serta tidak memandang dari segi taraf pendapatan orang tersebut.

Kedua, selain itu dalam proses perekrutan PKS menerapkan sistem perekrutan dengan melihat tingkat keimanan dengan cara melakukan tes keagamaan terhadap caleg tersebut hal ini dilakukan untuk menghindari para kader tersangkut kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta mengingat bahwa partai PKS adalah partai dakwah jadi para kader diharuskan paham terhadap agama.

Berdasarkan hal yang telah dipaparkan, maka terdapat problem mekanisme dalam merekrut caleg dikota Pontianak . Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **REKRUTMEN POLITIK DALAM PENETAPAN CALON LEGISLATIF TAHUN 2014-2019 (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Pontianak?)**

A.2 Rumusan Masalah

Adapun identifikasi masalah dalam permasalahan ini adalah

1. Adanya mindset masyarakat yang masih beranggapan bahwa partai PKS merupakan partai yang bersifat tertutup.
2. Tidak Adanya keterbukaan terhadap caleg pada rekrutmen politik partai keadilan sejahtera dalam penetapan calon legislatif tahun 2014-2019 dikota Pontianak

A.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah

1. Ingin menganalisa bagaimanakah pola rekrutmet yang diterapkan oleh partai keadilan sejahtera dalam merekrut calon legislatif dikota Pontianak
2. Ingin menganalisa seperti apa mekanisme penjangran dalam perekrutan yang diterapkan oleh Partai Keadilan Sejahtera dikota Pontianak

A.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan pengetahuan bagi seluruh partai politik dan juga meningkatkan kualitas rekrutmen pada partai politik.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan dan menambah wawasan keilmuan yang diperoleh serta mengaplikasikannya serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya.

A.5 Tinjauan Pustaka

A.5.1 Pengertian Partai Politik

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik menurut A Rahman, (2007:102) adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai dan cita-cita yang sama.

A.5.1 Rekrutment Politik

Kemudian dalam Rekrutmet Politik Menurut A .Rahman (2007:246) Rekrutment politik berasal dari dua kata yaitu rekrutment dan rekrutment politik bearti penyeleksian dan politik bearti urusan Negara jadi, rekrutment politik adalah penyeleksian rakyat untuk melaksanakan Negara.

Seperti halnya Miriam Budiardjo dan Surbakti dalam Gatra (2007:115) mengemukakan bahwa Rekrutmen politik ini merupakan bagian dari Fungsi Partai politik . Bagi partai politik, fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elit yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam. Sedangkan Menurut Seligman dan Jacob secara sederhana dijelaskan dikutip oleh

soetomo (2007) dalam Arsyiah (2013:157) Rekrutmen terdiri dari:

1. penyaringan dan penyaluran politik yang mengarah pada sifat memenuhi syarat bagi pencalon.
2. pencalonan yang mana merupakan proses dua tahap, yaitu inisiatif dan penguatan
3. Pemilihan

Jacob telah memperluas model Seligman dengan menambahkan sifat kepribadian dan posisi relevan perekrutan. Perekrutan awal adalah suatu proses dengan mana individu memiliki sifat kepribadian tertentu dan menempati posisi sosial yang di khusus kan dalam masyarakat yang disaring oleh institusi politik selama pemilihan jabatan. Proses rekrutmen menurut Jacob dapat dilakukan secara tertutup yakni dengan menempatkan organisai partai politik pada posisi yang kuat untuk mengontrol pada pemilihan kandidat secara terbuka dimana partai-partai adalah lemah dan memilki sedikit kontrol pada pemilihan kandidat.

A.5.2 Mekanisme Rekrutment Politik

Menurut Czudnomski dalam Partai Politik dan kebijakan Publik (Fadillah Putra,2003:209) adapun mekanisme rekrutmen politik adalah sebagai berikut:

1. Rekrutmen terbuka, di mana syarat dan prosedur untuk menampilkan seseorang tokoh dapat diketahui secara luas. Dalam hal ini partai politik berfungsi sebagai alat bagi elit politik yang berkualitas untuk mendapatkan dukungan

masyarakat. Cara ini memberikan kesempatan bagi rakyat untuk melihat dan menilai kemampuan elit politiknya. Dengan demikian cara ini sangat kompetitif. Jika dihubungkan dengan paham demokrasi, maka cara ini juga berfungsi sebagai sarana rakyat mengontrol legitimasi politik para elit. Adapun manfaat yang diharapkan dari rekrutmen terbuka adalah:

- a) Mekanismenya demokratis
- b) Tingkat kompetisi politiknya sangat tinggi dan masyarakat akan mampu memilih pemimpin yang benar-benar mereka kehendaki
- c) Tingkat akuntabilitas pemimpin tinggi
- d) Melahirkan sejumlah pemimpin yang demokratis dan mempunyai nilai integritas pribadi yang tinggi.

2. Rekrutmen tertutup, berlawanan dengan cara rekrutmen terbuka. Dalam rekrutmen tertutup, syarat dan

3. prosedur pencalonan tidak dapat secara bebas diketahui umum. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang

berasal dari dalam tubuh partai itu sendiri. Cara ini menutup kemungkinan bagi anggota masyarakat untuk melihat dan menilai kemampuan elit yang ditampilkan. Dengan demikian cara ini kurang kompetitif. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya.

B. METODE PENELITIAN

B.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menurut faisal (2012:12) bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisa, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi sekarang ini

B.2 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian dilakukan di kota Pontianak dan juga di DPD Partai Keadilan Sejahtera yang beralamatkan di Jl. Tani Kec. Pontianak Timur Jl. Wonobaru No. 3 Pontianak Selatan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun alasan yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian ini salah satu nya

adalah dikarenakan data yang diperlukan lebih lengkap.

B.3. Subjek Dan Objek

. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Ketua DPD PKS Kota Pontianak sekaligus Calon Legislatif Pontianak
2. Tim Seleksi DPD PKS sekaligus calon legislatif Pontianak selatan
3. Calon Legislatif Pontianak Kota
4. Sekretaris DPW PKS sekaligus Calon Legislatif Dapil 4 Pontianak Timur
5. Calon legislatif Pontianak Barat Bapak

Objek penelitian ini adalah Pola Rekrutmen politik Partai Keadilan Sejahtera Di kota Pontianak Tahun 2014

B.4 Teknik Penelitian

Pada penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer didapat dengan melakukan tehnik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah dalam menganalisis informasi menurut Moleong (2000:190) adalah sebagai berikut: Redukasi data, veritifikasi data, interpretasi data (penyajian data) adapun Teknik keabsahan data yang dilakukan

dalam penelitian ini dengan Triangulasi, dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu (Sugiyono, 2014:125). triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara triangulasi Sumber, hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, salah satu sumber yang diperoleh yaitu melalui wawancara kepada ketua DPD PKS Kota Pontianak dan caleg dari partai PKS kota Pontianak

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

C.1 Penyaringan Calon Legislatif

Partai politik memiliki peran yang sangat penting dalam merebut kekuasaan dimana merupakan salah satu alat utama untuk memperoleh kekuasaan dengan cara bersaing dalam pemilihan umum legislatif. Oleh karena itu partai melakukan Rekrutmen terhadap bakal caleg yang akan diseleksi melalui Internal maupun Eksteral Partai.

Di kota Pontianak PKS terus berkembang Sehingga nama PKS banyak dikenal di masyarakat sampai saat ini. Pada pemilu legislatif tahun 2014 merupakan

ajang dalam merekrut kader sebanyak-banyaknya. Adapun dalam memperoleh kader tentunya melalui proses penjaringan terlebih dahulu Seperti yang telah tertuang dalam Anggaran Dasar Partai Pada BAB XX Pasal 28 bahwa Rekrutmen jabatan politik untuk calon Presiden dan wakil presiden, gubernur dan wakil gubernur bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota dilakukan melalui proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan pertama, mekanisme yang demokratis dan terbuka kedua, Kapabilitas dan profesionalitas. Sedangkan untuk jabatan politik untuk calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan melalui suatu proses penjaringan dan penyaringan dengan memperhatikan yang pertama, Jenjang keanggotaan. Kedua, kapabilitas dan profesionalitas ketiga, keterwakilan perempuan. Adapun yang peneliti temukan di lapangan bahwa dalam penyaringan pada Partai PKS yaitu melalui internal dan eksternal partai adapun dari internal yaitu melalui kader inti dan struktur kepengurusan yang terdiri dari ketua DPD sekretaris dan bendahara kemudian di seleksi melalui Tim dan yang kedua melalui eksternal yaitu melalui ketokohan seseorang yang dianggap layak

namun pada pemilihan umum legislatif tahun 2014 partai PKS tidak ada menjaring dari eksternal partai karena partai tidak membuka pendaftaran secara terbuka akan tetapi partai lebih mengutamakan dari internal partai. sehingga dalam penyaringan tersebut partai hanya merekrut di internal saja. dalam penyaringan partai menetapkan beberapa kriteria dan syarat yang harus dipenuhi dari sumber yang peneliti temukan didalam partai Keadilan Sejahtera yaitu

1. kriteria bakal calon harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku
2. pria dan wanita yang berketuhanan yang maha esa serta beraqidah dan berakhlak baik
3. berkomitmen terhadap visi dan misi partai
4. tidak sedang terkait kasus hukum
5. tidak mempunyai rekam jejak dan citra yang buruk
6. tidak sedang terkena sanksi partai tingkat menengah dan berat
7. memiliki fisik yang sehat dan mental yang matang (tidak cacat fisik dan mental yang menghalangi tugas dan fungsinya sebagai anggota dewan dan tidak menderita sakit yang kronis).

8. Sekurang-kurangnya memiliki penguasaan terhadap satu bidang ilmu, khususnya yang diperlukan dilembaga legislatif
 9. Memiliki karakter atau kecenderungan sebagai politisi diantaranya minat dengan kegiatan-kegiatan publik, melakukan lobi-lobi, berinteraksi dengan media, mampu mempengaruhi orang lain, berani mengambil resiko, mampu berkomunikasi dan berargumentasi menjalin net working dan siap meningkatkan kemampuan diri.
 10. Mempunyai latar belakang sebagai aktivis didakwah, masyarakat, kampus atau organisasi yang tidak dilarang berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
 11. Mempunyai pemahaman tentang peranan politik dalam dakwah, dan tujuan dalam menegakkan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai islam.
 12. Pengurus inti partai dan anggota dewan ditingkat pusat/provinsi/kabupaten/ kota sebagai berikut tidak dapat menjadi Bakal Calon Anggota Dewan. Namun dapat dipertimbangkan oleh musyawarah partai untuk mengikuti survey kepatutan dan kelayakan Calon anggota Dewan
 13. Bakal Calon Anggota Dewan DPRD Provinsi/kabupaten/kota sekurang-kurangnya berpendidikan SMA atau sederajat.
 14. Dikenal cukup berpengaruh dimasyarakat atau dikenal sebagai tokoh masyarakat
 15. Potensi yang dimiliki dapat memperlancar kemenangan dipemilu
 16. Dapat berasal dari anggota inti, anggota pendukung, atau simpatisan partai
 17. Bersedia untuk melakukan akad dakwah dan politik dengan partai
- Sehingga dalam penyaringan di PKS mereka harus memenuhi syarat-syarat diatas.

C2. Pencalonan

DPD PKS setelah melakukan penyaringan yaitu terdiri dari internal dan eksternal partai. Pada pemilu Legislatif tahun 2014 dalam mempersiapkan calon Legislatif yaitu dengan mengusulkan nama-nama dari kader inti sampai ke struktur partai sehingga di PKS dalam pemilihan umum 2014 tidak membuka pendaftaran secara terbuka akan tetapi untuk mempersiapkan calon legislatif partai hanya mengusulkan nama-nama dari kader. Adapun dalam mempersiapkan calon

legislatif PKS merekrut kader setahun sebelum pemilu bahkan setiap waktu sudah dipersiapkan bahkan jauh dari sebelum pemilu partai sudah mngajak atau merekrut orang-orang yang dianggap layak dan mau bergabung dengan Partai Sehingga dalam mendapatkan calon legislatif partai sudah mempersiapkan dan menjaring sejak lama karena elit politik yang ada seharusnya dapat menghasilkan pelaku-pelaku politik yang berkualitas dimasyarakat karena salah satu tugas dalam rekrutmen politik adalah bagaimana elit politik yang ada dapat menyediakan kader-kader partai politik yang berkualitas untuk dilembaga legislatif maupun eksekutif. . Adapun proses dalam pencalonan pada PKS sendiri adalah dengan menunjuk nama-nama orang yang akan dicalonkan yaitu dari kader inti dan struktur kepengurusan sehingga dalam hal ini tidak ada yang dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai calon legilatif namun untuk memperoleh bakal calon partai merekrut dari kader inti dan para pengurus dari DPD, DPC, dan DPRA yang disaring melalui TIM yaitu terdiri dari Ketua, sekretaris dan Bendahara DPD.

C3. Pemilihan Calon Legislatif

Partai politik berperan sebagai wakil dari masyarakat untuk mengawasi jalanya pemerintahan agar tetap berjalan dengan baik dan sebagai mana mestinya, juga berperan dalam penyalur aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada pemerintah untuk bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil pemerintah yang benar-benar sesuai dan sejalan dengan keinginan rakyat, oleh karena itu partai politik terus merekrut kader/calon untuk menjadi wakil untuk menyampaikan kan diparlemen agar kebijakan pemerintahan bisa di pengaruhi dengan aspirasi masyarakat dan itu sangat dibutuhkan kader yang militan, tanggap, pintar sehingga perlu pengawasan baik itu dalam proses penentuan calon maupun setelah duduk di legislatif.

Rekrutment calon anggota legislatif adalah salah satu unsur proses yang demokratisasi yang ikut menentukan tinggi rendahnya kualitas demokrasi sebuah sistem politik. Semakin baik mekanisme pengrekrutan caleg semakin baik pula kualitas demokrasi sebuah sistem politik.

DPD Kota Pontianak dalam menentukan siapa yang layak untuk menjadi calon legilslatif dan yang tidak

layak serta menentukan nomor urut calon adalah dengan cara mereka menunjuk dan dimusyawarahkan melalui majelis syuro' yang paling tinggi Dalam struktur di PKS dalam majelis tersebut yang berkompetent dalam menentukan bakal caleg yang dimuyawarahkan yaitu mengambil dari nama-nama kader dan struktur kepengurusan yang dianggap layak dan memenuhi kriteria yang ditetapkan partai. Adapun proses dalam pemilihan tersebut yaitu dengan pemilu raya yaitu untuk menerima aspirasi semua kader. Jadi setiap kader menulis siapa yang layak untuk dicalonkan dari tingkat kecamatan kota, provinsi dan tingkat pusat ditulis bebas nanti baru disaring melewati Panitia tim pelaksanaan pemilu yang disebut BPPP (Badan Pemenangan Pemilu dan Penyelenggara) kemudian dari nama-nama yang dituliskan digodok dan diseleksi. Pada PKS sendiri dalam menentukan nya Adapun jumlah bakal caleg yang diusulkan adalah berjumlah 59 orang yang kemudian digodok sesuai perdapil dari 5 dapil kemudian diseleksi melalui tim dapat dilihat bahwa dalam memilih calon legislatif pada partai PKS disaring melalui tingkat bawah terlebih dahulu yaitu melalui DPRA.DPC dan DPD dan kader inti kemudian mereka menuliskan nama-

nama yang akan diusulkan kemudian dari nama-nama yang diusulkan disebut dengan Bakal Caleg yang akan dicalonkan kemudian yang menentukan adalah melalui Tim yang menyaring yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari nama-nama yang telah dikumpulkan tidak menutup kemungkinan bahwa dari beberapa yang dicalonkan ada beberapa yang tidak layak sehingga partai merekrut dari eksternal partai. Kemudian setelah nama nama sudah didapat kan maka dari bakal caleg berubah menjadi calon legislatif

D. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu mencakup tiga indikator yaitu:

1. Penyaringan dimana pada tahapan ini merupakan tahap awal dalam pengrekrutan calon legislatif di DPD PKS Kota Pontianak adapun mekanisme penyaringan yaitu terdapat dua mekanisme melalui internal dan eksternal partai. Kemudian, dalam penyaringan internal yaitu melalui tingkat terbawah yang terdiri dari kader inti dan struktur terbawah yaitu DPRA (Dewan Pengurus Ranting) dan DPC

(Dewan Pengurus Cabang) Dan DPD (Dewan Pengurus Daerah) sedangkan eksternal yaitu melalui para tokoh yang dianggap layak jual dan sudah dikenal

2. Pencalonan, dari proses pencalonan di DPD PKS Kota Pontianak dalam mempersiapkan bakal calon untuk diusung dalam pemilihan umum legislatif tahun 2014 partai tidak membuka pendaftaran secara terbuka untuk direkrut menjadi caleg akan tetapi, dalam hal ini untuk memperoleh bakal caleg para kader partai dari tingkat bawah hingga struktur mengusulkan nama-nama yang akan di calonkan dari usulan nama-nama tersebut ditulis dan setelah nama-nama sudah banyak maka tim yang akan menentukan siapa yang layak dan yang tidak layak untuk menjadi calon legislatif. di DPD PKS lebih mengutamakan internal partai karena selama di internal sudah memenuhi kuota yang diperlu kan maka partai tidak akan merekrut dari eksternal partai. Namun dalam hal ini para kader harus memenuhi kriteria dan syarat yang telah ditetapkan partai sehingga mereka tahu kapasitas dan elektabilitas orang tersebut

3. Pemilihan Adapun dalam pemilihan calon legislatif dan nomor urut calon legislatif yaitu di tentukan oleh Tim BPPP (Badan Pemenangan Pemilu dan Penyelenggara) yang terdiri dari Ketua DPD Sekretaris dan Bendahara setelah diseleksi dari bakal caleg berubah menjadi Calon legislatif kemudian barulah menentukan nomor urut melalui poling internal partai adapun dari proses poling internal partai yang diutamakan adalah para kader yang sudah lama sedangkan para kader muda menentukan dari urutan terbawah.

E. SARAN

Dari pembahasan tentang penelitian yang berjudul Rekrutmen Politik Dalam Penetapan Calon Legislatif Tahun 2014-2019 (Studi Kasus DPD Partai Keadilan Sejahtera Di Kota Pontianak, melalui analisis peneliti pada penelitian ini, peneliti akan memberikan beberapa saran, adapun saran-saran tersebut akan dipaparkan peneliti sebagai berikut:

1. Untuk semua elemen partai dari tingkat bawah Struktur hingga kader inti DPRA, DPC, DPD dan DPW, setidaknya PKS harus melibatkan tim

independent dari para tokoh agama dalam melakukan seleksi terhadap calon legislatif

2. Partai PKS harus menunjukkan strategi yang bisa memperkuat partai demi pemenangan pemilu yang akan datang, seperti dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan partai dan dalam proses perekrutan untuk membangun citra partai ditengah-tengah masyarakat.
3. Untuk semua kader PKS lebih menumbuhkan rasa kesadaran pada diri bahwa PKS adalah partai dakwah yang ber hikmat untuk rakyat sehingga lebih menjaga silaturahmi terhadap masyarakat

F. REFERENSI

BUKU

Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera

Agustino, Leo. 2007. *Perihal Ilmu Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Anggara,Sahya. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Cv Pustaka Setia.

Azhari, Syafii, kencana,Inu. 2002. *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: PT.Rafika Aditama

Althoff, Philip, Rush,Michel. 2011. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Budiardjo,Mirriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT.Dian

Faisal, Sanapiah. 2012. *Format-Format penelitian sosial* .Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian kualitatif: Teori dan Praktik*.Jakarta : PT Bumi Aksara

Gaffar,Afan.2006. *Politi Indonesia Menuju Transisi*. Yoyakarta: Pustaka Pelajar

Gatara.A.ASaid, Dzulkiah,Moh.2007. *Sosiologi Politik*.Bandung: Cv Pustaka Setia.

Moesafa dan Joko, J Prihatmoko. 2008.*Menang Pemilu ditengah Oligarki Partai*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Moleong ,lexy J, 2000.*Metode penelitian kualitatif*. bandung: PT Rajawali RosdaKarya

Putra,Fadila. 2003.*Partai Politik dan Kebijakan Publik*. yogyakarta: Pustaka Pelajar

Rahman. A. 2007. *Sistem Politik Indonesia*. Graha Ilmu: Yogyakarta

Satori, Djam'an. Aan Komariah. 2009. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2007. *Prilaku organisasi dan rekrutmen politik*. Jakarta: Prenada

_____. 2007. *Prilaku politik legislatif*. Jakarta: Prenada

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
UNDANG-UNDANG

Tim Redaksi Fokusmedia. 2009. *Undang-Undang Politik*. Bandung : Fokusmedia

Undang-Undang Partai Politik Pasal 7 Tahun 2007

JURNAL

Rofiq, Ainur. 2009. *Fungsi Rekrutmen politik pada calon legislatif Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) 2009*. (jurnal), Staf pengajar program studi ilmu pemerintah universitas islam"45" Bekasi.

Arsiyah, Sukmana, Hendra. 2013. *Model Rekrutmen anggota legislatif Oleh partai politik di DPD Partai Golkar Kabupaten Sidoardjo*. (Jurnal). Universitas Muhamadiyah Sidoardjo.

SKRIPSI

Azani, Muhammad. 2010. *Rekrutmen politik Caleg PKS Dan Caleg Golkar Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Yogyakarta*. UIN Sunan Kalijaga

Setiawan, Ade. 2015. *Pola Rekrutment Calon Legislatif Partai Nasional Demokrat pada Pemilu Legislatif 2014 Dikota Pontianak*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik universitas Tanjungpura

Pertiwi, Isnand. 2015. (Skripsi) *Prilaku Pemilih Etnis Jawa Pada Pemilih Kepala Daerah Kalimantan Barat (Studi didesa Rasau jaya satu kecamatan rasau jaya. Pontianak :Universita Tanjungpura*.

Anggiawan, Arry, Simon. 2015. *Pola Rekrutmen Calon Legislatif Partai Bulan Bintang Pada pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sekadau Tahun 2014* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.



LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : SITI ROMLAH
 NIM / Periode lulus : E02112069 / 1 / 2016 - 2017
 Tanggal Lulus : 05 - Agustus - 2016
 Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi
 Program Studi : Ilmu Politik
 E-mail address/ HP :

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa (ASPIRASI) (*) pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul**):

Rekrutment Politik Dalam Penetapan calon legislatif Tahun 2019-2019
 (Studi Kasus DPP Partai Keadilan Sejahtera di Kota Pontianak)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara fulltex
 content artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/ disetujui
 Pengelola Jurnal

Dibuat di : Pontianak
 Pada tanggal : 24 - 11 - 2016

Dr. Nurfitri, M.S.
 NIP. 408102002122002

SITI ROMLAH
 NIM. E02112069

Catatan :
 *tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
 (Publika Governance Aspirasi Sociodem Sosiologagae)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)